

EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA MEDIA

Heni Fatun Khusrotin

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
henikhusrotin@mhs.unesa.ac.id

Putri Aisyiyah Rachma Dewi

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
putridewi@unesa.ac.id

Abstrak

Sebagai media massa yang paling diminati oleh masyarakat, televisi memiliki pengaruh yang kuat untuk bisa memberikan stimulus kepada khalayak untuk mengubah pola pikir mereka melalui pesan dalam bentuk gambar dan suara. Dengan berbagai pilihan tayangan yang disajikan, televisi seolah-olah mampu memberikan hipnotis kepada penontonnya mengenai gambaran realitas yang disajikan dalam layar kaca adalah sesuatu yang benar adanya, seperti yang direpresentasikan dalam tayangan *reality show*. *Reality show* memiliki berbagai macam alur penayangan dan pengemasan salah satunya yang paling populer yakni *reality show* bertemakan kemiskinan. Tak hanya dari kalangan biasa, dalam proses produksinya program *reality show* juga menampilkan sosok penyandang disabilitas, dimana seringkali penyandang disabilitas diposisikan sebagai objek rasa iba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang ditampilkan dalam media penyiaran. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam permasalahan yang diangkat berdasarkan unit sosial tertentu. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa narasumber dan juga teknik observasi terhadap tayangan yang akan dianalisis. Bentuk-bentuk eksploitasi ditunjukkan melalui komunikasi secara verbal. KPI sebagai lembaga pengawasan penyiaran berpendapat bahwa perlu adanya mediasi untuk menyikapi program-program semacam itu.

Kata kunci: Televisi; *Reality Show*; Komodifikasi; Penyandang Disabilitas

Abstract

As the most popular mass media for public, television has a strong influence to be able to provide stimulus to public to change their mindset through messages in the form of pictures and sounds. With a wide selection of impressions presented, television seems to be able to give hypnosis to its viewers about the picture of reality which presented on the screen is something that is true, as represented in reality shows. The reality show has a variety of channels of broadcasting and packaging, one of the most popular of which is a poverty-theme reality show. Not only from ordinary circles, in the production process the reality show program also displays a person with disabilities, where often people with disabilities are positioned as objects of compassion. The purpose of this research is to find out the forms of exploitation of persons with disabilities displayed in broadcast media. This research method uses a case study research method. The study aims to examine in depth the problems raised based on certain social units. Data was collected using interview techniques for several speakers and also observation techniques for the impressions to be analyzed. The forms of exploitation are shown through verbal communication. KPI as a broadcasting supervisory institution believes that there is a need for mediation to address such programs.

Keywords: Television; *Reality Show*; Commodification; Disabled People

PENDAHULUAN

Televisi adalah salah satu jenis media masa yang menyediakan beragam informasi dalam setiap tayangannya. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap jenis tayangan apa yang akan ditonton dan mendapatkan informasi aktual yang mereka butuhkan. Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media massa lain yaitu mampu menyajikan sebuah pesan melalui bentuk visual dan audio sehingga mampu memasuki pola pikir penonton dengan mudah. Televisi memiliki keutamaan yakni menggabungkan gambar, suara, musik dan sebagainya menjadi satu kesatuan sehingga penonton menjadi tertarik karena dapat menikmatinya dalam satu waktu secara bersamaan. (Effendy, 2004).

Media massa semakin berkembang dan memunculkan suatu kontra perspektif terhadap ideologi yang dibentuk oleh kapitalis. Terdapat kritik yang menyatakan bahwa tak hanya berperan sebagai sarana penyampaian pesan, tapi juga kini mulai berubah fungsi sebagai alat yang mampu mengendalikan perspektif penontonnya. Media massa kini berupaya menciptakan suatu nilai-nilai tertentu yang pada akhirnya membuat kesenjangan sosial. Media massa khususnya televisi tetaplah suatu bidang usaha yang bergerak pada industri penyiaran. Di mana dalam industri itu sendiri ada komoditas yang diperjual belikan (Holmes, 2012).

Seiring berjalannya waktu, program tayangan di televisi semakin kreatif dan berkembang menyesuaikan minat masyarakat, sehingga televisi memproduksi program acara *reality show*. Format tayangan *reality show* kini digarap dengan menggunakan alur cerita tertentu dan memunculkan konten-konten sensitif untuk bisa menarik perhatian penonton dan profit iklan semakin bertambah. maka persoalan tersebut merupakan sebuah praktik komodifikasi terhadap objek yang direpresentasikan salah satunya yaitu kelompok penyandang disabilitas.

Disabilitas memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang. (*World Health Organization*, 1980) menyatakan disabilitas merupakan kondisi *impairmen*, yaitu kehilangan atau ketidaknormalan yang dialami seseorang baik dalam segi psikologis, fisiologis, atau kelainan struktur sehingga membuat seseorang sulit untuk melakukan aktivitas atau kegiatan seperti orang normal pada umumnya.

Selain dilihat dari sudut pandang kaca mata kesehatan, definisi disabilitas juga dapat diperhatikan melalui aspek muatan moral dan konstruksi sosial (Finkelstein, 2002).

Representasi yang keliru atau yang merendahkan para penyandang disabilitas di media dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi yang kemudian menimbulkan berbagai masalah bagi penyandang disabilitas, karena media berperan sebagai sarana yang menyajikan berbagai informasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang tersaji dalam media televisi akan dijadikan acuan oleh para penontonnya. Program yang dikemas secara tidak tepat dapat menimbulkan persepsi tertentu di mata masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) menyebutkan bahwa pengertian eksploitasi adalah memanfaatkan, dan melakukan pemerasan terhadap orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Menurut Theodorson (1979: 115-116) diskriminasi merupakan suatu bentuk perlakuan pembeda yang dilakukan terhadap seseorang atau suatu kelompok karena terdapat sebuah identitas yang mencakup kategori tertentu, misalnya ras, agama, atau kelompok sosial. Representasi dari diskriminasi dapat terlihat secara nyata melalui sebuah bentuk asumsi negatif yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kelompok. Praktik eksploitasi dan diskriminasi menjadi salah satu upaya untuk menjadikan suatu kelompok sebagai komoditas penyiaran.

Penyandang disabilitas masih menjadi kelompok minoritas di masyarakat. Isu terhadap kelompok penyandang disabilitas masih menjadi isu sensitif di masyarakat, karena alih-alih mendapat perlindungan penyandang disabilitas justru masih sering mengalami tindak kekerasan dan mendapatkan perlakuan diskriminasi serta menjadikan mereka sebuah objek lelucon. Kekerasan yang dilakukan merupakan kekerasan secara verbal dan nonverbal, tersirat melalui narasi dan dialog yang diterapkan secara simbolik. Hal tersebut kemudian merujuk pada representasi objek terhadap penyandang disabilitas. Bentuk-bentuk eksploitasi dan diskriminasi direpresentasikan melalui pengucapan, dialog, serta tayangan audio visual yang memiliki makna merendahkan, meragukan, dan memunculkan stigma-stigma

negatif terhadap penyandang disabilitas. Televisi seringkali menggambarkan kekurangan fisik penyandang disabilitas sebagai bentuk eksploitasi dengan cara mengekspos bagian-bagian tubuh, kemudian menyematkan pertanyaan-pertanyaan seputar kondisi fisik penyandang disabilitas. Hal tersebut kemudian memunculkan jalan cerita yang sedih, yang dapat memicu reaksi penonton untuk bisa mengikuti cerita secara lebih rinci dan lebih dalam. Tayangan semacam itu, sudah semestinya memiliki regulasi yang kuat untuk mengatur, karena representasi penyandang disabilitas yang ditunjukkan dalam tayangan tersebut bersifat diskriminatif dan eksploitatif. Penyiaran televisi di Indonesia diawasi oleh KPI berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Peraturan mengenai perlindungan terhadap kelompok-kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitas sebenarnya sudah terdapat dalam P3SPS tahun 2012 yang ada saat ini, dalam Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi; “program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu” yang didalamnya mencakup penyandang disabilitas. Hal yang sama juga disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 ayat (6) bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia oleh KPI telah diatur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Dalam menjalankan tugasnya, KPI memiliki kuasa dalam mengawasi industri penyiaran serta menjadi lembaga yang bertugas untuk melakukan mediasi antara masyarakat dengan pelaku media agar korelasi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga penyiaran dapat berjalan seimbang.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan secara lebih mendalam dan konstan tentang apa yang ada di latar belakang permasalahan dan kondisi yang sedang terjadi terhadap unit sosial tertentu. Subjek penelitian

dapat berupa individu, kelompok, institusi dan masyarakat. Studi yang berfokus pada pokok permasalahan unit sosial tertentu merupakan ciri khas dari penelitian studi kasus. (Sulistyaningsih, 2011). Metode studi kasus berusaha untuk mengamati suatu tindakan keputusan dan alasan yang mendasari kenapa keputusan itu diambil serta dampak yang dihasilkan dari pengambilan keputusan tersebut (Salim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada beberapa hasil studi mengenai tayangan *reality show* di televisi menjelaskan bahwa proporsi tayangan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek yang dapat diperjualbelikan dan memiliki karakter lemah serta patut dikasihani cukup sering ditemui dalam media penyiaran di Indonesia khususnya televisi. Berbagai bentuk diskriminasi dan penggambaran yang tidak sesuai tentang kelompok penyandang disabilitas dalam media bermula dari susunan pola media massa yang lebih menunjukkan sikap pro kepada kelompok yang berpengaruh atau penguasa dan melalaikan kelompok minoritas.

Semakin maraknya konten tayangan televisi yang melakukan tindak eksploitasi pada kelompok-kelompok minoritas, disinilah peran KPI sangat dibutuhkan untuk dapat mengatur isi siaran yang ditampilkan. Setiap program acara yang ditayangkan di televisi harus memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan oleh KPI melalui P3SPS. Adapun peraturan yang telah menjadi standar penyiaran oleh KPI yaitu tentang peraturan mengenai pembatasan konten isi siaran, kewajiban, pelarangan, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap media yang melanggar dengan jelas tertulis pada P3SPS. Standar Program Siaran (SPS) berisi aturan-aturan tertentu mengenai standart isi siaran yang seharusnya ditampilkan. KPI juga berperan sebagai lembaga perlindungan terhadap masyarakat untuk bisa memberikan filter serta pengawasan apabila dalam suatu program sudah bersifat eksploitatif. Komisioner Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono menyatakan bahwa eksploitasi yang terjadi dalam suatu program maka harus segera ditindaklanjuti dianggap memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama rata semuanya.

dan disikapi dengan cara menganalisis unsur-unsur apa saja yang telah dilanggar dalam P3SPS.

Secara normatif, jika tidak ada pasal yang dilanggar dalam P3SPS maka KPI tidak bisa memberikan sanksi terhadap program tersebut. Pasalnya, tidak ada peraturan yang jelas mengenai tindakan eksploitatif terhadap suatu golongan tertentu dalam P3SPS. KPI bisa menjatuhkan sanksi apabila suatu program mengandung unsur yang jelas dilarang dalam P3SPS, seperti menampilkan gambar-gambar yang menakutkan, memancing kecemasan penonton, mengajak anak-anak atau remaja untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik dan semacamnya. Akan tetapi, belum adanya pelanggaran dalam program-program semacam itu tidak menjadikan KPI bersikap acuh mengenai konten-konten yang mengandung unsur eksploitatif. KPI terus melakukan mediasi, menjadi penengah dengan terus memperhatikan aspek-aspek yang terjadi dalam media penyiaran.

PENUTUP

Simpulan

Seperti yang telah tertulis dalam P3SPS Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi; "program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu" yang didalamnya mencakup penyandang disabilitas. Hal yang sama juga disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 ayat (6) bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Regulasi tersebut secara jelas mengatur tentang perlindungan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan termasuk dalam penayangan konten yang memuat tentang kelompok disabilitas di televisi. Televisi sebagai media masa yang masih banyak diminati oleh masyarakat justru menempatkan kelompok disabilitas sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan cara melakukan eksploitasi dan diskriminasi melalui pesan-pesan simbolik baik verbal maupun nonverbal. Hal tersebut secara tidak langsung menyematkan stigma negatif dan merepresentasikan penyandang disabilitas sebagai kelompok marjinal.

Setiap program acara yang ditayangkan di televisi harus memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan oleh KPI melalui P3SPS. KPI juga berperan sebagai lembaga perlindungan terhadap

masyarakat untuk bisa memberikan filter serta pengawasan apabila dalam suatu program sudah bersifat eksploitatif.

Saran

KPI sebagai lembaga penyiaran di Indonesia diharapkan bisa menetapkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang praktik-praktik eksploitasi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, O.U. (2004). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Finkelstein, V. (2002). "The Social Model of Disability Repossessed". Coalition: the Magazine of the Greater Coalition of Disabled People, 1-16.
- Holmes, D. (2012). Teori Komunikasi: Media, Teknologi, dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pustaka, B (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Salim, A. (2006). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulistyaningsih. (2011). Metodologi Penelitian Kebidanan, Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Theodorson, G. A. (1979). A Modern Dictionary of Sociology. New York: Barnes & Noble Books.
- Williams, R. (2009). Televisi. Yogyakarta: Resist Book.